



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan penggunaan lahan yang terjadi dalam suatu daerah sangat berhubungan erat dengan manusia dan lingkungan (Satya & Rahardjo, 2013). Kebutuhan terhadap lahan pemukiman ini akan semakin banyak seiring dengan peningkatan jumlah manusia yang menempati lahan tersebut. Menurut Satya dan Rahardjo (2013), daerah yang dapat menyeimbangkan antara kepadatan penduduk yang ditampung dengan kondisi lingkungan daerahnya merupakan bentuk perkembangan dan pertumbuhan daerah yang baik. Namun dewasa ini, membentuk daerah yang baik sudah semakin sulit dilakukan. Pertumbuhan manusia yang pesat tidak diimbangi oleh pertumbuhan kebaikan kondisi lingkungan daerahnya.

Hampir setiap saat, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia menghasilkan sampah (Ruslinda, et al., 2012). Sampah yang dihasilkan pun beranekaragam, dimulai dari bahan organik yang mudah terurai lebih kurang 3 hari tergantung cara pengolahannya (Ngantung, 2015) hingga anorganik yang sulit terurai dengan membutuhkan waktu 2 bulan hingga ratusan tahun (Mahanal, et al., 2009). Sampah ini harus dibuang dan/atau dikumpulkan secara terpisah pada suatu tempat penampungan khusus karena sampah tersebut dapat mengakibatkan efek yang buruk bagi lingkungan. Namun, sayangnya hingga saat ini banyak masyarakat yang masih bingung akan sistem pemilahan sampah, salah satunya masyarakat Jakarta sendiri (Siahaan, 2015). Keadaan ini menyebabkan sampah dibuang dalam keadaan tercampur menjadi satu, sehingga sampah anorganik pun akhirnya ikut terkena dampak hasil terurainya sampah organik, yaitu munculnya bau, cairan lindi, dll.



Lambat laun tentu sampah campuran ini akan mengurangi keasrian lingkungan serta menimbulkan dampak-dampak lain yang membahayakan makhluk hidup sekitarnya. Salah satu efek yang jarang disadari oleh masyarakat adalah pertumbuhan dan berkembangbiakan bakteri sebagai akibat menumpuknya sampah dan membuat area disekitarnya lembab (Maryono, 2007). Masalah ini haruslah segera diatasi dengan tepat dan berkelanjutan.

Pasal 5 Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2008 menyebutkan pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan bersama dengan masyarakat. Kewajiban ini diperjelas dengan mengacu pada pasal 22 ayat 1c bahwa kegiatan penanganan sampah dilakukan dengan mengangkut sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPS) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Hingga saat ini, pemerintah di berbagai daerah terus melakukan kegiatan pengangkutan sampah ini. Namun, kenyataan di lapangan kapasitas pengangkutan di bawah laju pertumbuhan sampah kota. Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh pada kebutuhan prasarana pengangkutan sampah (Amin, et al., 2010).

Di Kota Tangerang Selatan, penerima Piala Adipura selama 3 tahun berturut-turut, sampah diberitakan menggunung di Kelurahan Petir sebagai akibat dari tidak teraturnya pengangkutan sampah yang terjadi pada tahun 2014 lalu (Uis & Made, 2014). Dampak negatif yang muncul dari sampah yang tertumpuk ini adalah bau menyengat yang mengganggu, munculnya lalat yang mengerubungi sampah, merusak estetika badan jalan dan kenyamanan peziarah makam hingga menyebabkan kecelakaan beruntun seperti yang dilansir pada *Satelitnews*, 10 Juli 2014 lalu. Kejadian ini bertolakbelakang dengan peraturan yang mengharuskan pemerintah mengangkut sampah dengan bantuan kontribusi dari warga. Padahal, dengan melihat keadaan sampah di Indonesia yang hingga saat ini mayoritas masih berupa sampah



campuran menyebabkan kegiatan pengangkutan harus dilaksanakan secara teratur.

Keadaan pengangkutan sampah yang tidak teratur dan efisien ini jika dibiarkan saja tentu di masa depan kejadian yang terjadi di Kelurahan Petir, Tangerang Selatan dapat juga terjadi di Kota Semarang. Pengangkutan sampah yang hanya dilakukan lebih kurang 65% ($m^3/hari$) terhadap volume timbulan sampah harian di Kota Semarang menunjukkan ketidakteraturan pengangkutan yang ada (Maryono, 2007). Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang menghambat pengoptimalan kegiatan tersebut, diperlukanlah suatu analisis sistem pengangkutan sampah oleh pemerintah di Kota Semarang.

1.2. Perumusan Masalah

Kota Semarang, salah satu kota terbesar dan ibukota di Provinsi Jawa Tengah, memiliki volume timbulan sampah kurang lebih 4000 $m^3/hari$. Volume itu tidak dapat diimbangi dengan sistem pengangkutan sampah yang dilakukan ke TPA, yaitu hanya sebesar 2600 $m^3/hari$ (Maryono, 2007). Menurut Amin dkk (2010), kejadian tidak terangkutnya sampah ini merupakan indikator bahwa pengelolaan pelayanan pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal. Sistem pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada prakteknya tentu harus mempertimbangkan jumlah sampah yang harus diangkut, frekuensi ritasi pengangkutan sampah, dan pola pengangkutan yang dilakukan saat ini. Selain itu, rute pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan biaya operasional kendaraan pengangkut sampah saat ini juga ikut mempengaruhi jalannya sistem pengangkutan sampah. Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan karena sistem ini dilakukan untuk mengurangi resiko akibat sampah di lingkungan mengingat bahwa sampah campuran yang ada di masyarakat saat ini memiliki waktu degradasi yang cukup singkat sebagai akibat sampah organik yang ikut tercampur bersama sampah jenis lainnya.



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui rute pengangkutan sampah dari TPS sampel ke TPA di Kota Semarang yang dilaksanakan saat ini,
2. Mengetahui kapasitas sampah saat ini di TPS sampel dan yang harus diangkut oleh kendaraan angkut menuju TPA,
3. Mengetahui frekuensi pengangkutan sampah saat ini,
4. Mengetahui ritasi pengangkutan sampah yang seharusnya dilakukan di TPS sampel,
5. Mengetahui biaya operasional kendaraan (BOK) pengangkutan sampah saat ini dari TPS sampel ke TPA oleh pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu masukan bagi perbaikan sistem pengangkutan sampah di Kota Semarang,
2. Sebagai sarana untuk melengkapi lingkup pengetahuan, terutama mengenai sistem pengangkutan sampah.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah disusun karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan, sehingga penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Wilayah sampel Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Banyumanik dengan pertimbangan pada jumlah penduduk terbanyak bulan Maret tahun 2015 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2015) dan perbedaan jarak antara wilayah sampel terhadap TPA Kota Semarang.
2. Sampel TPS yang diambil khusus di daerah pemukiman karena pembagian wilayah sampel didasarkan pada jumlah penduduk yang bermukim di tempat tersebut dan menggunakan TPS yang tersedia.



Analisis Sistem Pengangkutan Sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir di Kota Semarang
(Studi Kasus: Kecamatan Semarang Barat, Pedurungan, dan Banyumanik)

3. Sistem pengangkutan sampah yang akan diteliti menggunakan alat angkut berupa truk *armroll* karena di Kota Semarang mayoritas TPS yang tersedia berupa kontainer.
4. Penelitian ini hanya membahas tentang rute pengangkutan sampah dari TPS sampel ke TPA dan biaya operasional kendaraan pengangkut yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang saat ini, sehingga pengaruh-pengaruh lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini.

